

---

## PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN DAN TINGKAT KEPATUHAN LAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BANK DI INDONESIA

---

### **Tommi Yulianto**

STIE Indonesia Banking School  
tyulianto22@gmail.com

### **Hayu Susilo Prabowo**

STIE Indonesia Banking School  
hayu.prabowo@ibs.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to assess the completeness and suitability of the Sustainable Financial Statement in Conventional and Sharia Banks with reporting principles, disclosure standards and overall assessment of the implementation of Peraturan OJK (POJK) Nomor 51 tahun 2017 on Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies. The research method of this study is an analysis of the Banks' Yearly Sustainable Financial Statement in the period 2016-2018 and then performed a qualitative analysis based on completeness of 86 components fulfillment in 43 variables designated in the reporting technical guidelines which is regulated by OJK and reporting quality assessment.*

*The result of the test shows the improvement in both the completeness and quality of the Sustainable Financial Statement. Conventional Banks conduct the reporting relatively better compared to Sharia Bank. In general, Banks are accountable in the report, especially on the disclosure of the efficiency of resources and energy use. The difference that is reflected in the report between Conventional and Sharia banks that have financial conglomerate relations needs to be a concern for the stakeholders including regulators to include sustainable finance as part of financial conglomerates and reporting principles needs to be standardized in the form of report format or indexing by regulator.*

**Keywords:** *sustainable finance, sustainable financial reporting, analysis of the completeness and compliance of sustainability reporting, sustainable financial reporting syariah banking, laku pandai, POJK 51 implementation*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian Laporan Keuangan Berkelanjutan pada Bank Konvensional maupun Syariah dengan prinsip-prinsip pelaporan, standar pengungkapan dan penilaian secara keseluruhan terhadap penerapan Peraturan OJK (POJK) nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa terhadap isi Laporan Keuangan Berkelanjutan bank secara tahunan pada periode 2016 – 2018 dan kemudian dilakukan analisa kualitatif berdasarkan kelengkapan pengisian 86 Komponen dalam 43 variable yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaporan yang diatur oleh OJK dan penilaian kualitas pelaporan.

---

\*) Corresponding Author

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Berkelanjutan menunjukkan peningkatan baik dari pengisian kelengkapan maupun kualitas pelaporan. Bank konvensional relatif melaporkan pelaporan lebih baik dibandingkan dengan bank syariah. Secara umum bank sangat terbuka pada laporan khususnya pada pengungkapan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi. Perbedaan hasil laporan antara bank konvensional dengan syariah yang memiliki hubungan konglomerasi keuangan perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan termasuk regulator untuk memasukkan keuangan berkelanjutan menjadi bagian dari konglomerasi keuangan termasuk peran OJK dalam melakukan standarisasi format laporan atau indexing

**Kata Kunci:** keuangan berkelanjutan, laporan keuangan berkelanjutan, analisa kelengkapan dan kepatuhan pelaporan keberlanjutan, laporan keuangan berkelanjutan bank syariah, laku pandai, penerepan POJK 51

---

## 1. PENDAHULUAN

Kebutuhan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan. Instrumen ekonomi, perusahaan tidak lepas dari berbagai pengaruh lingkungan, terutama lingkungan ekonomi dan lingkungan politik (Suryawijaya dan Setiawan (1998). Pembangunan ekonomi yang menimbulkan dampak negatif mendorong dicetuskannya konsep sustainable development yaitu pembangunan yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial.

Kewajiban untuk membuat Sustainability Report di Indonesia telah diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan. Bentuk dan isi laporan keuangan diantaranya adalah uraian mengenai aktifitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (Peraturan Bapepam Nomor Kep-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2016). Dalam peraturan tersebut mencanangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005 – 2025.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

### Sustainable Development

SDGs merupakan kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. MDGs selama ini hanya berisi 8 tujuan, 21 sasaran, dan 60 indikator. MDGs memberikan tanggung jawab yang besar pada target capaian.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Serta POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green bond).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul “Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Tingkat Kepatuhan Laporan Keuangan Berkelanjutan Bank di Indonesia”. Pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang terhadap negara maju.

Lima (5) prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam SDGs antara lain: People (manusia), Planet (bumi), Prosperity (kemakmuran), Peace (perdamaian), dan Partnership (kerjasama). Hal ini menjadi pembeda yang sangat mendasar karena dalam SDGs mengutamakan kerjasama oleh seluruh pihak tidak sekedar pada Negara berkembang dan kurang berkembang.

Bank sebagai suatu lembaga sektor keuangan juga didorong untuk melakukan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang disebut greenbanking. Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pembuatan keputusan bisnis maka dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas operasi lembaga keuangan sehingga dapat membantu upaya tanggung jawab sosial perusahaan dan

mencapai keberlanjutan (Shaumya & Arulrajah, 2016).

### **Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia**

Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan seluruh aspek yang mempengaruhi kelestarian lingkungan pada akhirnya akan memiliki dampak yang negatif pada lingkungan itu sendiri, hal ini dikarenakan kapasitas dan daya dukung sumber daya alam. Pendekatan supply and demand yang merupakan pokok dari teori ekonomi juga menjadikan lingkungan sebagai objek eksplotasi.

Menurut M.Baiquni 2002 (dalam Burhanuddin 2016) bahwa strategi yang dapat digunakan dalam integrasi lingkungan ke dalam pembangunan ekonomi meliputi pengembangan pendekatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pengembangan pendekatan pencegahan pencemaran dan pengembangan sistem neraca ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sumber pendanaan untuk melakukan implementasi SDGs bersumber dari 3 (hal) sumber pendanaan, antara lain: sektor publik, sektor swasta dan sektor sosial. Sektor swasta mempunyai peluang yang paling besar melakukan implementasi SDGs pada tahun 2030 agar segera terealisasi, salah satunya cara yaitu Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengajak seluruh Sektor Jasa Keuangan (SJK) untuk berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Hal tersebutlah yang mendasari POJK No.51/POJK.03/2017 dan No.60/POJK.03/2017 menjadi pintu utama penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

### **Sustainability Reporting**

Menurut Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa Sustainability Reporting atau laporan keberlanjutan merupakan bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk mengungkapkan (disclose) atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik (LST) secara akuntabel.

Dengan adanya pelaporan keberlanjutan pada perusahaan dapat membantu perusahaan/organisasi dalam melakukan mengukur, memahami serta melakukan komunikasi terhadap kinerja ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola pada perusahaan/ organisasi mereka, yang kemudian dapat segera melakukan penetapan tujuan serta mengelola perubahan secara lebih efektif.

Menurut Burhanudin (2016), terdapat empat hal yang menjadi pembicaraan oleh banyak kalangan dan akademisi, antara lain: yang pertama terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan manusia yang ditopang dengan kemampuan dan daya dukung ekosistem, kemudian yang kedua adalah upaya meningkatkan mutu kehidupan manusia dengan cara melindungi dan memenuhi kebutuhan manusia untuk masa yang akan datang, yang ketiga merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia dan alam yang akan dibutuhkan pada masa yang akan datang, dan yang keempat merupakan upaya mempertemukan kebutuhan manusia antar generasi.

Ahmed Belkaoui (1980), model lingkungan sosial menjelaskan bahwa kekuasaan ekonomi dan politik yang dimiliki mempunyai hubungan dengan kepentingan lingkungan sosial. Perusahaan harus memperluas tujuan yang harus dicapai yaitu yang menyangkut kesejahteraan sosial secara umum.

### **Standar Pengungkapan menurut Roadmap OJK Regulator melalui Otoritas Jasa**

Keuangan (OJK) pada tahun 2014 mengeluarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015 – 2019 yang menjabarkan tujuan pencapaian keuangan berkelanjutan di Indonesia baik dalam jangka menengah (5 tahun) dan panjang (10 tahun). Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) juga menetapkan rencana strategis keuangan berkelanjutan di Indonesia meliputi (3) tiga bidang utama:

1. Peningkatan supply pendanaan ramah lingkungan hidup.
2. Peningkatan demand bagi produk keuangan ramah lingkungan hidup.

### 3. Peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan.

Dalam Pasal 2 ayat (2) mewajibkan bank untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan dengan menggunakan prinsip adalah Prinsip investasi bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, prinsip tata kelola, prinsip komunikasi yang informative, prinsip inklusif, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas, dan prinsip koordinasi dan kolaborasi. Keberhasilan dari penerapan keuangan berkelanjutan berawal dari bagaimana LJK melakukan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 bahwa RAKB yang disusun berdasarkan prioritas dari masing-masing LJK.

Laporan keberlanjutan juga menjadi salah satu alat ukur bagi pemangku kepentingan eksternal lainnya untuk melakukan uji banding (benchmark) serta menjadi sarana bank untuk mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. (Hayu Prabowo, 2019).

## 3. METODE PENELITIAN

### Pandangan Syariah dalam Pembiayaan Ramah Lingkungan

Etika lingkungan Islam (Hayu Prabowo, 2019), seperti semua bentuk-etika dalam Islam, berlandaskan pada hukum dari wahyu Allah dan sabda Rosulullah. Dengan demikian, dalam Islam penerimaan dari apa yang sah dan etis tidak sama dengan pemikiran yang mendasarkan hukum yang berlandaskan pada filosofi rasionalisme.

Dalam ekonomi syariah sangat tercermin dalam keuangan berkelanjutan karena dalam ekonomi syariah memperhatikan 5 (lima) kebutuhan dasar umat manusia yang tertuang dalam perjanjian madinah (maqashid) syariah. Standar hidup yang berlandaskan pada maqashid syariah merupakan pembangunan ekonomi yang mengutamakan usaha untuk menciptakan kebaikan yang mendatangkan faedah atau manfaat untuk kemaslahatan umat.

### Penerapan Keuangan Berkepanjutan dan Tingkat Kepatuhan Bank

Pengujian kelengkapan dan kesesuaian Laporan Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Bank terhadap Peraturan OJK (POJK) nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dilakukan pada 6 Bank BUMN konvensional dan syariah yang juga memiliki hubungan konglomerasi keuangan.

Pemilihan metode kualitatif yang digunakan untuk melakukan analisa data adalah metode analisis isi (content analysis). Dalam menentukan kelengkapan pelaporan sesuai dengan ketentuan OJK, maka peneliti menggunakan penetapan penilaian dengan metode DSCORE yaitu dengan memberikan nilai 0 dan 1 pada prinsip laporan.

Dalam melakukan uji kualitas pelaporan keberlanjutan digunakan skala likert dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 dengan kajian menggunakan metode komparasi dengan analisa deskriptif atas 9 (sembilan) formulir laporan sesuai dengan sesuai dengan frame work OJK.

Prinsip kelengkapan pengisian isi, dilakukan pengujian terhadap kelengkapan pengisian 86 (delapan puluh enam) komponen dan 43 (empat puluh tiga) variabel dengan menggunakan sistem D-Score yaitu dengan memberikan nilai 0 jika bank tidak melakukan pengungkapan dan 1.

Pada pengujian 86 komponen yang menjadi prinsip pelaporan keberlanjutan yang dilakukan oleh 6 (enam) bank, rata sudah pada 70.35% (2016), 72.67%(2017), dan 73.06% (2018).

Pada prinsip pelaporan keberlanjutan dengan menggunakan 43 variabel diketahui bahwa tahun 2016 rata-rata 35.70, 2017 rata-rata 37.17, dan 2018 rata-rata 38.00 dari 43 variabel yang harus dipenuhi dengan persentase 2016 sampai dengan 2018 (82.56%, 86.43%, dan 88.37%).

**Table 1.**  
**Kelengkapan 86 Komponen Pelaporan Keuangan Berkelanjutan**

Tahun	BRI	Mandiri	BNI	BRI Syariah	BSM	BNI Syariah	%
2016	68.60%	81.40%	77.91%	72.09%	61.63%	60.47%	70.35%
2017	80.23%	77.91%	77.91%	70.93%	62.79%	66.28%	72.67%
2018	80.23%	77.91%	79.07%	68.60%	63.95%	68.60%	73.06%

**Table 2.**  
**Kelengkapan 43 Variable Pelaporan Keuangan Berkelanjutan**

Tahun	BRI	Mandiri	BNI	BRI Syariah	BSM	BNI Syariah	%
2016	0.79	0.88	0.91	0.81	0.79	0.77	82.56%
2017	0.95	0.86	0.93	0.81	0.84	0.79	86.43%
2018	0.95	0.93	0.95	0.81	0.84	0.81	88.37%

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa atas 9 Aspek yang menjadi kriteria dalam pelaporan bank diejelaskan sebagai berikut :

a. Penjelasan Analisa Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Analisa penjelasan strategi keberlanjutan pada laporan keberlanjutan adalah untuk melakukan penilaian atas penjelasan yang dilakukan oleh Bank terkait dengan visi, misi, pengelolaan risiko, dan pengungkapan strategi dan rencana keuangan berkelanjutan. Pengungkapan penjelasan strategi keberlanjutan mempunyai trend peningkatan tercatat tahun 2016 (75.00), 2017 (77.50) dan 2018 (85.83).

Baik bank BUMN konvensional dan syariah tren peningkatan, walaupun secara total perbankan syariah dalam penyampaian penjelasan belum secara detail seperti bank konvensional. Tingkat kelengkapan penyampaian bank konvensional 2016 (77.50), 2017 (82.50), dan 2018 (91.67) lebih baik dari bank syariah dengan tahun 2016 (72.50), 2017 (72.50) dan 2018 (80.00).

b. Analisa Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan

Pelaporan ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan yang memiliki 10 (sepuluh) komponen, aspek lingkungan memiliki 4 (komponen) dan aspek sosial dengan 2 (dua) komponen. Secara umum pelaporan atas ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan mengalami tren meningkat atau membaik dalam penyampaiannya, dimana pada tahun 2016 kualitas pelaporan pada kisaran "cukup lengkap" dengan nilai 69.29, sementara 2017 dan 2018 meningkat (76.77 dan 78.90).

Kesamaan seluruh bank dalam menyajikan laporan keberlanjutan pada aspek ini adalah belum diungkapkannya persentase portofolio kegiatan usaha berkelanjutan terhadap portofolio. Hanya Bank Negara Indonesia yang menyusun persentase tersebut, pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Negara Indonesia terkait dengan Kredit Pembiayaan Hijau (Green Financing Korporasi). Perlu menjadi catatan bahwa dalam pelaporan keberlanjutan terkait dengan kredit/pembiayaan hijau lebih banyak menjelaskan industri kelapa sawit yang bagi sebagian Negara mempunyai dampak lingkungan tinggi.

Pada pengungkapan Aspek Lingkungan hidup dan aspek sosial (secara umum dapat dijelaskan oleh bank dengan baik. Pada bank syariah sebagian besar baru menjelaskan terkait dengan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan, belum sepenuhnya menyentuh inti usaha bank.

c. Analisa Pelaporan Profil Singkat

Pada penjelasan profil singkat yang terdiri dari 6 (enam) variabel menunjukkan bahwa Bank tidak mengalami kesulitan dalam melakukan penjelasan atas profil singkat. Secara keseluruhan pada pelaporan sudah dilaporkan dengan kondisi yang sangat lengkap yaitu tahun 2016 (98.06), 2017 (98.33) dan 2018 (97.59).

d. Analisa Penjelasan Direksi

Analisa penjelasan direksi merupakan terjemahan dari Ringkasan pencapaian kinerja, tantangan, dan strategi, yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Secara umum pada pelaporan ini setiap tahunnya mengalami perbaikan dan perubahan yang semakin baik. Penilaian pada analisa penjelasan direksi pada tahun 2016 (76.48), 2017 (81.39) dan 2018 (83.98) angka ini merupakan pencerminan bahwa pada pelaporan penjelasan direksi sudah lengkap disampaikan dan mendekati sangat lengkap.

e. Analisa Tata Kelola Keberlanjutan

Pada analisa tata kelola keberlanjutan merupakan penilaian atas penyampaian komitmen bank dalam menjalankan tata kelola dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, secara umum pengungkapan tata kelola pada laporan keberlanjutan bank pada tahun 2016 dan 2017 dengan penilaian cukup lengkap 65.83 (2016) dan 67.22 (2017). Terjadi perbaikan pelaporan secara signifikan pada tahun 2018 menjadi lengkap dengan nilai 74.17.

f. Analisa Kinerja Keberlanjutan

Pada bagian ini pelaporan keberlanjutan harus menjelaskan komitmen bank dalam membangun budaya keberlanjutan dan melakukan sosialisasi mengenai budaya keberlanjutan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan. Kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup menyatu pada portofolio produk dan/atau jasa bank.

Pelaporan kinerja ekonomi berdasarkan penilaian diketahui bahwa keterbukaan atas informasi kinerja ekonomi dalam laporan keberlanjutan belum disampaikan secara optimal oleh bank, hal ini dibuktikan dengan index penilaian pada laporan tersebut pada tahun 2016 (45.44), 2017 (37.28), dan 2018 (35.00). Selain itu jumlah komponen yang lengkap disajikan dalam laporan keberlanjutan tidak melebihi 50% (kurang cukup) yang tergambar pada 2016 (45.61%), 2017 (37.72%) dan 2018 (35.09). Gambar 25 memperlihatkan tabel kelengkapan pengisian kinerja ekonomi.

**Tabel 3.**  
**Penilaian dan Kelengkapan Pelaporan Kinerja Ekonomi**

SR6110	Nilai	Rata-rata Jumlah Komponen terpenuhi	
		Jumlah	%
2016	45.44	8.67	45.61%
2017	37.28	7.17	37.72%
2018	35.00	6.67	35.09%

Terdapat pola yang sama pada pelaporan kinerja ekonomi pada seluruh bank dimana kelengkapan pengungkapan tidak disajikan sesuai dengan petunjuk teknis OJK. Tren penurunan dapat terlihat pada tahun 2016 dengan nilai 45.44, 2017 dengan nilai 37.28, dan tahun 2018 dengan nilai 35.00.

Pengungkapan kinerja sosial yang disajikan bank dalam laporan keberlanjutan secara umum sudah lengkap, salah satu dukungan atas laporan ini adalah program CSR yang sudah menjadi agenda bank sebagai bentuk kepedulian sosial. Tren kualitas pelaporan meningkat sejak 2016 (77.29), 2017 (80.42) dan 2018 (84.79). Baik bank konvensional maupun bank syariah relative tidak memiliki kendala dalam menyusun dan mengungkapkan kinerja sosial.

Pelaporan atas kinerja lingkungan baik atas tujuh variabel pelaporan sudah dilakukan dengan

sangat lengkap oleh bank konvensional dan bank syariah. Secara keseluruhan pada aspek lingkungan terdapat perbaikan pelaporan yang terlihat dari gambar 34, dimana pada tahun 2016 memiliki nilai 58.33, 2017 68.17 dan 2018 72.17. Inovasi dan pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan (SR6410), bank syariah masih memiliki keterbatasan dalam melakukan pengungkapan. Hal ini seharusnya dapat dijadikan peluang oleh bank syariah untuk memiliki pembeda pada daya saingnya.

g. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen

Bank BRI, Bank BNI dan Bank Syariah Mandiri telah melakukan verifikasi independen atau assurance independent statement, yang dimuat dalam laporan keberlanjutan oleh lembaga Independen. Dalam verifikasi yang dilakukan baik oleh bank yang sudah menggunakan jasa verifikator atau tidak, belum menjelaskan atas melibatkan audit internal dalam melakukan assessment internal pelaporan.

h. Lembar dan Tanggapan Umpan Balik

Bagian ini menjelaskan SR8000 (lembar umpan balik/ feedback) dan SR9000 (tanggapan bank terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya). Seluruh bank telah menyajikan lembar umpan balik sangat lengkap, namun terkait dengan umpan balik belum ditemukan adanya laporan dan tanggapan atas umpan balik, walaupun form umpan balik secara lengkap sudah menjadi bagian dari pelaporan.

Secara keseluruhan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2018 terjadi peningkatan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan.

**Table 4.**  
**Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Berkelanjutan**

Tahun	BRI	Mandiri	BNI	BRI Syariah	BSM	BNI Syariah
2016	65.24	76.14	79.41	67.59	62.21	62.02
2017	83.87	72.83	82.32	69.15	67.97	65.17
2018	85.47	80.40	86.74	66.15	72.58	66.77

Kesiapan bank konvensional lebih baik dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan berkelanjutan, tercatat pada penilaian tahun 2016 dengan nilai 73.60, tahun 2017 dengan nilai 79.67, dan tahun 2018 sebesar 84.70 yang dapat diindikasikan bahwa laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh bank konvensional secara rata-rata sudah diungkapkan secara lengkap dan hampir memiliki penilaian sangat lengkap.

Penilaian laporan keberlanjutan secara rata-rata bank sudah sangat baik, terdapat beberapa hal penting yang perlu diungkapkan dengan optimal dengan penilaian kurang lengkap, antara lain:

- SR5600, yang merupakan bagian dari tata kelola. Tahun 2016 (30.00), 2017 (26.67), dan 2018 (45.00).
- SR6110, yang merupakan bagian dari kinerja keberlanjutan untuk menerangkan pencapaian dari sisi kinerja ekonomi. Tahun 2016 (45.44), 2017 (37.28), dan 2018 (35.00).
- SR6120, juga bagian dari kinerja keberlanjutan untuk menerangkan pencapaian dari sisi kinerja ekonomi. Tahun 2016 (31.67), 2017 (31.67), dan 2018 (34.17).
- SR6222, merupakan bagian dari penilaian terkait dengan ketenaga kerjaan yang harus menjelaskan persentase remunerasi pegawai. Tahun 2016 (43.33), 2017 (31.67), dan 2018 (43.33).

## 5. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Penerapan keuangan berkelanjutan pada perbankan di Indonesia berdasarkan pada penilaian kelengkapan dan kualitas pelaporan menunjukkan adanya tren peningkatan yang baik dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Kelengkapan pengisian atas 43 variabel terus meningkat sejak 2016

yang secara rata-rata sudah terisi sebanyak 82.56% (35.5), tahun 2017 sebesar 86.43% (37.17) dan tahun 2018 sebesar 88.37% (38). Berdasarkan pengujian kualitas pelaporan memiliki tren yang sama meningkat dari sisi kelengkapan laporan dimana dijelaskan pada gambar 39 bahwa tahun 2016 memiliki nilai kulaitas 68.77, 2017 sebesar 73.55 dan 2018 sebesar 76.35. Keseriusan perbankan dalam melakukan penerapan keuangan berkelanjutan juga didukung oleh regulator. Baik bank syariah maupun bank konvensional.

Pengujian terhadap prinsip pelaporan terdiri dari pengujian atas prinsip kelengkapan pengisian komponen pelaporan dan pengujian prinsip yang mendefinisikan kualitas pelaporan. Dalam pengujian kelengkapan pengisian 86 komponen yang mempengaruhi 43 variabel penelitian diketahui bahwa kelengkapan pengisian mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 70.35%, 2017 sebesar 72.67%, dan 2018 sebesar 73.06%.

Bank konvensional melakukan pengungkapan pelaporan lebih baik dibandingkan bank syariah, walaupun secara perkembangan baik bank konvensional maupun syariah mengalami perbaikan dalam pelaporan. Bank konvensional dalam melakukan pengisian 43 variabel sudah pada level 94.57% pada tahun 2018 sementara bank syariah 82.17%. Pada pengisian 86 komponen pelaporan pada bank konvensional lebih lengkap berbanding dengan bank syariah. Dimana pada tahun 2018 bank konvensional secara rata-rata telah mampu melengkapi 68 komponen (79.07%) sementara bank syariah 57.67 (67.05%). Secara kualitas pelaporan bank konvensional dinilai lebih baik dengan nilai 84.20 (laporan disajikan dengan lengkap) pada tahun 2018 sementara bank syariah ada pada kisaran 68.50 (cukup lengkap) yang terlihat pada gambar 39.

Dalam pelaporan keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh bank, perlu menampilkan atau bank memiliki khusus yang diungkapkan sebagai produk keuangan berkelanjutan serta meningkatkan pemanfaatan Skema blended finance untuk membiaya maupun menerbitkan produk-produk berkelanjutan.

Koordinasi internal bank dalam memastikan kompetensi, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan penyusunan laporan keuangan berkelanjutan secara sistematis perlu mendapatkan dukungan dari regulator berupa indexing atas komponen-komponen penting dalam pelaporan, dimana saat ini indexing yang digunakan yang berasal dari GRI.

Regulator dengan Bank pelapor melakukan koordinasi dan pengutan pada sisi ketentuan untuk penyempurnaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang mencakup Keuangan Berkelanjutan. Hal ini akan mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi penerapan keuangan berkelanjutan, khususnya pada bank yang memiliki keterbatasan anggaran.

Bank syariah perlu mengikut sertakan MUI dalam melakukan assessment atas laporan keberlanjutan yang dilaporkan bank syariah Keterlibatan MUI dalam melakukan hal tersebut bertujuan agar kaidah ekonomi dapat berjalan sesuai dengan maqashid syariah yaitu pembangunan ekonomi yang mengutamakan usaha untuk menciptakan kebaikan yang mendatangkan faedah atau manfaat untuk kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Abdelfattah Hamdan Zyadat (2017) - *The Impact of Sustainability on the Financial Performance of Jordanian Islamic Banks*.
- Belkaoui, Ahmed (1985), *Accounting Theory*, 2nd Edition, Harcourt Brace Jovanovich Publishing Co.
- Choudhury, M. A. (1993) b. *The Unicity Precept and the Socio- Scientific Order*. Lenham: University Press of America.
- Choudhury, M. A. (2007) *The Universal Paradigm and the Islamic World-System: Economy, Society, Ethics, and Science*. London: World Scientific.
- Hanasri, Rury (2013) – *Analisa Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report) tahun 2011 dari 30 BUMN terhadap Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.1. dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan*.

- 
- Indonesiana (2019) - <https://www.indonesiana.id/read/116384/belajar-dari-dua-pakar-keuangan-berkelanjutan-global>
- Joyosumarto, Subarjo (2018) – Kepemimpinan Lembaga Perbankan Abad ke-21
- Kumar and Prakash Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility (2019) - Examination of sustainability reporting practices in Indian banking sector.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2019) - Analisis Laporan Keberlanjutan Pada 8 Bank First Mover
- Olaf Weber, University of Waterloo, [oweber@uwaterloo.ca](mailto:oweber@uwaterloo.ca) (2017) - Corporate sustainability and financial performance of Chinese banks.
- Otoritas Jasa Keuangan (2014) - Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia Roadmap For Sustainable Finance In Indonesia 2015-2019.
- Otoritas Jasa Keuangan (2017) - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.
- Otoritas Jasa Keuangan (2018) – Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.
- Prabowo, Hayu (2019) - The International Congress for Conservation Biology (ICCB), Faith For Conservation.
- Sindonews (4 Mei 2018) - <https://nasional.sindonews.com/read/1302781/15/10-problem-tejo>
- Tejo, Aziz Ario (2013) – Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap Kinerja Keuangan. [www.ojk.go.id](https://www.ojk.go.id) <https://mui-lplhsda.org> [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id) [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id) [www.bni.co.id](http://www.bni.co.id) [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

